

KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN Makassar)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

PRATIWI AURINA

NIM : 10500112052

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pratiwi Aurina
NIM : 10500112052
Tempat / Tgl lahir : Ujung Pandang, 19 April 1993
Jurusan /Prodi /Konsentrasi : Ilmu Hukum
Fakultas / Progam : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Waduk Pemancingan
Judul : **Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak dalam
Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak**

Menyatakan dengan kesungguhan dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang tertera dalam pernyataan adalah hasil karya sendiri. Dan jika di kemudian hari terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan duplikat, tiruan dan merupakan bentuk plagiat karya orang lain. Maka dengan ini skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi Hukum.

Makassar, 31 Maret 2016

Penyusun

PRATIWI AURINA
NIM: 10500112052

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, yang disusun oleh saudari Pratiwi Aurina, NIM: 10500112052, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, bertepatan dengan Jumadil Akhir 1437 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 31 Maret 2016

22 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof.Dr.DarussalamSyamsuddin,M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H. M.H	(.....)
Munaqisy I	: Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H.M. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hamsir, S.H, M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof.Dr.Darussalam Syamsuddin,M.Ag.

NIP. 1957041419860310

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul, “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No. 111 / Pid.Sus / 2015/ PN Makassar)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Makassar. Salam dan salawat senantiasa di panjatkan kehadiran Nabi Muhammad swt, sebagai *Rahmatallilalamin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Kakek H. Anwar Sanusi dan Ayahanda Herman Sumantri yang selalu menjadi panutan penulis serta kerja kerasnya yang selalu mendukung penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum dan bisa menegakkan keadilan dan Nenek Hj. NurungdanIbunda NurliaSanusi atas dukungan dan pengorbanannya baik moral

dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang hidupnya serta tak pernah lelah dalam membimbing penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum bisa membalasnya.

2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Siselaku Rektor Universitas Islam Negeri Makassar. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag selaku Wakil Rektor I. Prof. Dr. Bapak H. Lomba Sultan, M. A. selaku Wakil Rektor II dan Ibu Prof. Siti Aisyah, M. A., Ph. D. selaku Wakil rektor III Universitas Islam Negeri Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Hamsir., S. H, M. H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. Saleh Ridwan, M. Ag. selaku Pembantu Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Makassar atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Istiqamah, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Muhammad Sabir, M. Ag selaku Penasehat Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.

6. Bapak Prof. Dr. SabriSamin,M.Ag dan Bapak DR. Hamsir, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan perhatiannya dengan penuh kesabaran serta ketulusan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Ashabul Kahpi, S.Ag. M.H selaku penguji I dan Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan,M.Agselaku penguji II.
8. Saudara tercintaku selaku Kakak Briptu Herlin Puspitasari S.H yang telah memberikan segalanya didalam kehidupanku.
9. Sahabatku dalam penyusunan skripsi, Fitriani Untung, Ilham Syukur, Andi Dhedani, Khalik Subhan, Meri Meriana, St. khadijah Nur Fajri, Jusmiarni, Angga, Fadel Ahmad, Irwan, Tegar Dermawan, Siti Sarah, Akbar, dan terkhusus Adhyatman Asrun yang selalu senantiasa membantu dan saling memberi semangat satu sama lain, perjuangan kita pasti akan selalu terkenang sepanjang masa.
10. Keluarga besarku yang selalu memberiku semangat mendoakanku, Putri Anggrayni Adik perempuan ketiga, Den Bagus Sumantri Adik bungsu laki-lakiku, Sardi Sanusi, Ipul Sanusi, Santi Sanusi, Ina Sanusi, Neti, dan Syukur Sanusi.
11. Teman-teman Organisasi Riri, Alfi Quthniy, Erwin Karim, Akbar Rahman, Aswan Sakti, Putri Indah Pratiwi. Terima kasih untuk teman-teman tercinta yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsinya.

12. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Ilmu Hukum Pidana..

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua Amin.

Makassar, 28 Maret 2016

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. PengertianKejahatan	10
B. Pertimbangan Hakim dalamMenjatuhkanPutusan	13
C. PengertianKejahatanAsusilaTerhadapAnak	17
D. Bentuk Perlindungan kejahatan Terhadap Anak	20
E. PengertianAnak	21
F. PengertianPerlindunganAnak	22
G. KerangkaKonseptual	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. PenerapanHukumTerhadapKejahatanKesusilaan TerhadapAnak(StudiKasusPutusan No. 111/Pid.	

	Sus/2015/PN Mks)	32
C.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PN Mks)	49
D.	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PN Mks)	64
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Implikasi Penelitian	68
KEPUSTAKAAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



NAMA : PRATIWI AURINA
NIM : 10500112052
JUDUL : KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Permasalahan dari penelitian ini adalah (1) penerapan hukum terhadap kejahatan kesusilaan terhadap anak putusan nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar, (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar, (3) bentuk perlindungan hukum kejahatan kesusilaan anak putusan nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : *yuridis normatif*, menggunakan buku-buku sebagai referensi (kepuustakaan). Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil putusan dari Pengadilan Negeri Makassar putusan nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui penyajian data, editing data, dan penarikan kesimpulan. Tentang Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak (studi kasus putusan no. 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar)”

Hasil penelitian ini menunjukkan : aturan dan sanksi hukum terhadap kejahatan kesusilaan terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan telah diperbarui dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam pasal 81 ayat (2). Sebagaimana yang telah dijelaskan.

Implikasi dari penelitian ini adalah dari kesimpulan di atas terkait dengan penegak hukumnya yakni Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka penulis hanya ingin mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat. Pengadilan Negeri Makassar harus lebih memperhatikan lagi kasus seperti kejahatan kesusilaan terhadap anak seperti yang telah teliti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi seperti sekarang ini, kejahatan adalah momok yang sangat mengerikan karena dapat terjadi dimana-mana dan tak memandang bulu tentang siapa yang akan menjadi korbannya. Penelitian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relative, tergantung pada manusia siapa yang menilai. kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan.

Kejahatan, dalam tingkat penerima oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia pada umumnya, korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa, tetapi anak juga rawan menjadi korban kejahatan. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana asusila pada anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Pada kasus asusila terhadap anak sebagai contoh kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan sudah memasuki tahap yang memperhatikan, karena setiap harinya

kasus asusila yang melibatkan anak sebagai korbannya sering kita dapatkan dan kita saksikan diberbagai media massa, baik di majalah, Koran, maupun stasiun-stasiun televise swasta yang kini marak menyajikan berita-berita seputar dunia kriminal.

Tindak pidana asusila adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.

Asusila merupakan suatu pelanggaran dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, silsilah dan agama, terutama tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan. Tetapi, kenyataannya justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di kelompok berpendidikan menengah ke atas. Jadi kekerasan terjadi di lapisan sosial masyarakat, agama, politik, maupun latar belakang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan khususnya terhadap seorang anak bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang. Budaya yang ada dalam masyarakat selama ini

menempatkan dominasi laki-laki terhadap keluarga. Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung. Dalam hal terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, seorang ayah yang karena tidak mampu menahan nafsu birahinya tega melakukan tindak kekerasan seksual terhadap seorang anak tersebut masih di bawah umur. Padahal sebagai seorang ayah seharusnya ia menjaga dan merawat anaknya sampai tumbuh dewasa karena anak merupakan kehormatan keluarga meskipun anak tersebut bukan anak kandungnya sendiri.

Definisi anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Upaya perlindungan hukum kepada anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- 1.) Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- 2.) Penuntutan bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kejahatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) yang mengatur :

- 1.) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2.) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3.) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidikan, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antarpribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.

Pencegahan tindak pidana asusila dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang asusila, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Selain penjelasan diatas, dijelaskan pula dalam hukum islam sangat jelas bahwa setiap hubungan seksual atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang tidak sah adalah perbuatan zina. Jika perbuatan zina itu dapat dibuktikan maka hukumnya adalah hak Allah, yaitu hudud seperti yang termuat Dalam al-Qur'an surah al-Nur/24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari keduanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹

Dan ayat yang berkaitan lagi surah al-Israh /32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.²

Dan dikuatkan dan jelas dalam hadis.

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا لَبَّيَّةً كَالَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Lelaki dan wanita (yang sudah menikah) jika keduanya berzina, rajamlah keduanya secara tetap sebagai hukuman dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (H.R Ahmad dari Ubay bin Ka’ab).³

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Toha Putra, 2002), h. 543.

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Toha Putra, 2002), h. 285.

³ Abir Al-Jazairi. *Minhajul Muslim*, Darul Fikr. h. 434.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Kejahatan Kesusilaan Anak dalam Perspektif Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus No.111 Pid.Sus/2015/PN.Mks mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum	<p>a. Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.</p> <p>b. hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.</p>
2.	Kejahatan	<p>a. Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara, dan secara sosiologis kejahatan dipandang sebagai setiap tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan yang dipidana oleh negara apa pun bentuk pidananya.</p>

		<p>b. Bentuk-bentuk kejahatan sangat beragam, dapat dilakukan secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Beberapa kejahatan itu melibatkan unsur kekerasan dan yang lainnya tidak, seperti yang terjadi dalam kejahatan.</p>
3.	Anak	<p>a. anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan.</p> <p>b. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: – Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.</p>

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Jelaskan Penerapan Hukum terhadap kejahatan kesusilaan terhadap anak dalam Putusan No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN. Mks ?
2. BagaimnaPertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 111 / Pid. Sus/ 2015 / PN. Mks ?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kejahatan kesusilaan anak dalam Putusan No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN. Mks ?

D. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka merupakan bagian dimana calon peneliti harus mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikasi dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.

Membahas tentang kejahatan kesusilaan terhadap anak yang merupakan salah satu tindak pidana, selain dilarang oleh agama juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP).

Kejahatan Asusila adalah: menyuili anak perempuan di jalannan, memanggil-manggil, mengomentari secara tidak sopan, menceritakan lelucon kotor kepada

seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan derajat, komentar terus-menerus mengenai seks atau yang memiliki makna ganda, memperlihatkan gambar seksi, kalender, majalah, atau buku bergambar perempuan kepada orang yang tidak menyukainya, terus-menerus bertanya kepada seseorang mengenai kehidupan pribadi atau kegiatan seksualnya, terus-menerus mengajak berkencan seorang anak yang jelas-jelas tidak mau, menggerakkan tangan atau tubuh secara tidak sopan di hadapan seorang anak, memandang atau mengerling, menyentuh, menyubit, menepuk, menimang, mengamati tubuh seorang anak secara berlebihan, memeluk, atau menciumi seorang anak yang tidak menyukai pelukan, dan ciuman tersebut.⁴

Kekerasan yang dialami oleh anak-anak dilakukan dengan fokus di empat arena dimana anak-anak banyak menghabiskan waktunya yakni di rumah, sekolah, dan tempat umum. Dari hasil penelitian oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA), di kota Makassar menemukan bahwa jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh anak-anak dibedakan menjadi tiga, yakni kekerasan mental (*mental abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), dan kekerasan seksual (*sexual abuse*). jenis kekerasan fisik atau *physical abuse* adalah jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak, di susul kemudian dengan kekerasan mental dan kekerasan seksual.⁵

Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan tergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut, yang

⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta; Kencana 2010. Hal. 236

⁵Muljyana wkusuma. *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Cet. I; Jakarta; CV. Rajawali, 1986), hal. 3

maksudnya adalah bahwa setiap peserta bertanggungjawab atas pengadaan kesejahteraan anak.⁶

Dari ketentuan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kejahatan asusila terhadap anak adalah perbuatan dan perilaku yang menentang Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejahatan yang dimaksud dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh/fisik anak tersebut menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini biasanya berupa khawatir, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik seorang anak yang telah mengalami kejahatan asusila biasanya berupa lecet, luka, memar, patah tulang dan sebagainya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan kesusilaan pada anak dalam Putusan No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN. Mks.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN. Mks.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan asusila dalam Putusan No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN. Mks

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), hal. 213

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Praktis

1. Dapat Memberikan informasi maupun saran sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham terhadap kejahatan kesusila anak tentang perlindungan anak.

B. Manfaat Teoretis

1. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang, dan juga sebagai teguran terhadap pemerintah untuk lebih sigap menanggapi kasus pelayanan publik yang merugikan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologi, maupun kriminologis.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

Menurut Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat asusila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹

Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-

¹Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, *Antara Norma dan Realita* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 52.

Undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Apabila hakim menjatuhkan putusan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di Persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Namun, sebelum menjatuhkan putusan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim yaitu:

1). Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas, hakim betul-betul harus menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:

“Hakikat pada Pertimbangan *yuridis* hakim merupakan pembuktian unsure-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai tindak pidana yang didakawakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau putusan hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidenda* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktek pengadilan sebelum pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dilakukan, maka hakim terlebih dahulu menarik fakta-

fakta dalam persidangan yaitu timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Fakta –fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*lucus delicti*) dan (*modus delicti*) tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu harus diperhatikan akibat akibat langsung atau tindak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan merupakan kebohongan, dan terdakwa dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya didepan Persidangan

2. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam pasal 27

(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baikdengn tidak ada kecualinya”.

Sebagai upaya pemenuhan menjadi kehendak rakyat ini maka dikeluarkan sebagai peraturan perundang-undangan yangsalah satunya adalah undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Salah satunyaadalah pasal dalamUndang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini:

”Hakim sebagai penegak hukummenurut pasal 5 (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus penggali nilai-nilai hukum yang hidup dilakalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyalami perasan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan putusan yang sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Faktor – faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu putusan perkara adalah:

- a). Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b). memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang memperingankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c). Memperhatikan ada tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,
- d). Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri.

3. Pertimbangan Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang sifat unsure ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi syarat agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a). Harus ada perbuatan,
- b). perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu kegiatan hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini.
- c). Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan oleh ketentuan hukum.
- d). Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang melawan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata jelas bertentangan dengan hukum.
- e). Harus tersedia ancaman hukumnya.

C. Pengertian Kejahatan Asusila Terhadap Anak

Kata susila dalam bahasa inggris adalah moral, *ecthis*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda dan kata moral diterjemahkan dengan moril, kesopanan sedang *ecthics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.² Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (keasusilaan termasuk didalamnya).³ Didalam agama keasusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar ketentuan Allah atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan buruk /tercela yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan tentang asusila, mabuk, dan judi. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.⁴

Dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan perbuatan cabul. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

Pencabulan adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), bercabul : berzina, melakukan

² Marpaung Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Cet Ke-3, hlm, 2.

³ Adam Cazawi, *Op.cit* , h. 1.

⁴ *Ibid*

bertindak pidana asusila, mencabul : menzinai, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya.⁵

Definisi yang diungkapkan Moeljetno lebih menitik beratkan pada:

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu:

Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁶

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang kerap berhubungan dengan nafsu seksual, didalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap keasusilaan ini tidak terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada anak-anak dibawah umur.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang 35 tahun 2014 mendefinisikan bahwa anak adalah merupakan amanah sekaligus karunia Allah

⁵ Moeljetno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), cet ke-6, hlm 106.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996, cat ke-5, hal 212.

SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Dalam pandangan Islam anak juga dipandang sebagai amanah Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.⁷

Sering terjadinya kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak maupun wanita, khususnya perbuatan asusila yang sering anak menjadi korban pelepasan nafsu untuk memenuhi kebutuhan seks. Pemerkosaan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi manipulasi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya berlindung di balik slogan “*mau sama mau, suka sama suka*”. Slogan ini pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi.⁸

Menurut Wahyuni (1997), ada beberapa tahap yang patut diwaspadai proses menuju perkosaan yaitu :

1. Ajakan pergi jalan-jalan dengan bergandengan tangan
2. Ajakan pergi naik sepeda motor dengan tangan dililitkan dipinggang
3. Ajakan nonton film dan berkesempatan melakukan rabaan dan ciuman.

⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), cet. Ke-2, hal.24.

⁸ Bagug Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet ke-2, hlm 259.

4. Ajakan ketempat rekreasi dan mungkin penginapan yang dilanjutkan dengan persetubuhan.
5. Bila terjadi kehamilan, laki-laki yang bersangkutan melarikan diri dan tidak bertanggung jawab.

Dari uraian diatas juga terjadi pada anak-anak yang menjadi korban asusila yang diiming-imingkan dengan pemberian seperti uang, kekuasaan, dan tipu muslihat, sehingga mereka melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka.

D. Bentuk Perlindungan Kejahatan Terhadap Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu di perlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa :

Hukum adat, Hukum perdata, Hukum pidana, Hukum acara perdata, Hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan :

”masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, social, dan budaya”.⁹

E. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Selain itu juga anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Sistem hukum di Indonesia tidak mempunyai keseragaman dalam memberikan pengertian tentang anak (orang yang belum dewasa), demikian pula kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat ketentuan yang beragam tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriterianya. Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 53.

yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.¹⁰

F. Pengertian Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak Secara Umum

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan social. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dengan kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian

¹⁰ Wagianti Soetodjo, *Deklarasi Hak Anak-Anak, Hukum Pidana Anak, Bandung, 2008, hlm 76.*

hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹²

Sehubungan dalam hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan:

”Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tindak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonom, social, dan budaya.”¹³

2. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Syar’i Hukum Islam

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam islam, adalah seperti yang digambarkan hadis nabi Muhammad SAW: *“tidak termasuk golongan ummatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”* (Riwayat at-Turmudzi).

¹¹ Arif Gosita dalam Syamsuddin Muchtar. **Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana** (Disertasi). Makassar. 2012. Hal. 85

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan hak-hak Anak, Jakarta, 1986, hlm. 22.*

Jadi kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh kehormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus di dahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah pada anaknya, selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.

Beginilah cara Al-qur'an dan hadis-hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. "dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengwali

melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua. Jadi, tinggalkan anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya.

Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram. Dan bisa mengakibatkan seseorang *Su'u Al-Khatimah* (meninggal dalam keadaan sesat).

G. Kerangka Konseptual

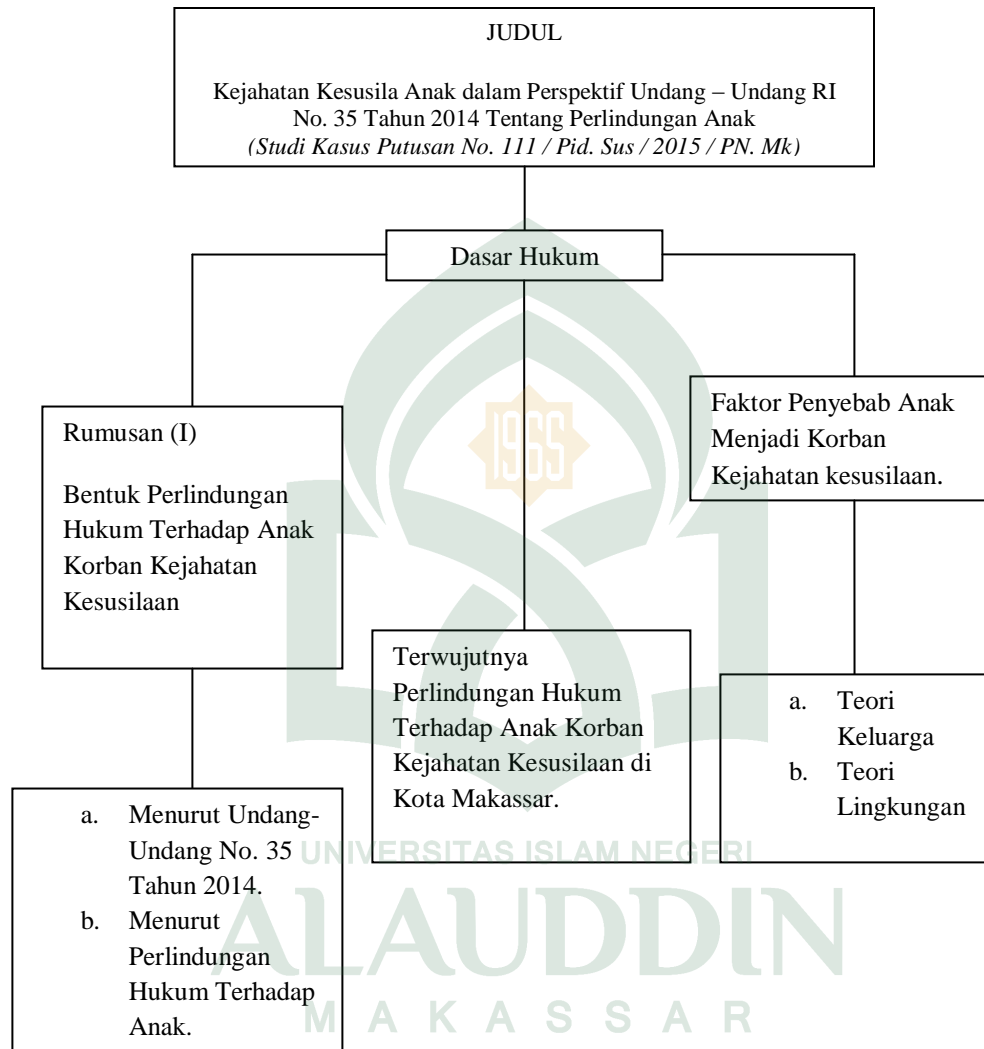
Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dalam tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep

dan operasional penelitian. Temuan hasil peneliti yang telah ada sangat membantu dan mempermudah peneliti membuat kerangka konseptual.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 merupakan undang-undang yang membahas tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dijalankan agar menjamin hak-hak anak sebagai korban.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian lapangan (*Field Research Kualitatif*). Yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah terhadap dokumen perkara serta putusan-putusan Pengadilan Negeri Makassar yang berkaitan dengan Kejahatan Kesusilaan terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Makassar yakni Pengadilan Negeri Makassar. Alasan penulis memilih kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena di Makassar banyak indikasi-indikasi kenakalan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kejahatan kesusilaan, sehingga penelitian ini sangat tepat apabila dilakukan di kota Makassar. Pertimbangan lain bahwa Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat dengan perkembangan perekonomian dikawasan timur Indonesia menjadi ukuran keamanan dan jaminan untuk masa mendatang yang senantiasa wajib dijaga keamanan dan ketertibannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini ialah pendekatan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

C. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer adalah data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengannya rasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dankompetensi dengan permasalahan yang ada.
2. Data Sekunder, adalah data-data siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dara sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka, yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensial, dari karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

2. Sumber penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui wawancara.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui proses wawancara

Peneliti melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan terhadap anak. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Studi pustaka

Peneliti melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu yang bersumber dari bahan primer, sekunder, dan tersier.

3. Proses Observasi

Observasi merupakan instrument penelitian yang digunakan untuk melihat atau mengamati apa yang dikerjakan orang mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi apa yang mereka kerjakan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dalam metode yang digunakan. Adapun njenis-jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik dari primer atau data sekunder akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambar umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Makassar

Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang Jalan Ammanagappa) (Asmunandar, 2008).

Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar.

Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, Letaknya dibagian selatan bangunan

b. Batas-batas wilayah Pengadilan Negeri Makassar

Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119° 24' BT-5° 8' 90,7" LS.

Dan adapun batas-batas wilayah Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa;
4. Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar.

a. Visi Dan Misi

1. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

2. Misi

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

B. Untuk Mengetahui Penerpan Hukum Terhadap Kejahatan Kesusilaan Pada Anak Dalam Perspektif Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Putusan No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN. Mks.

1. Posisi Kasus

Berdasarkan Putusa No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN.Mks. Tentang sebuah kasus mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak. Terdakwa pada kasus ini bernama Ramlan Umar alias Alan, pada hari Minggu tgl 10 Mei 2015 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah kosan saudara Alan yang terletak di Jalan Mannuruki II Makassar atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan dengan maksud melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau pembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa menjemput kemudian dibawa ke kos terdakwa di Mannuruki II, bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa lewat handphone dan korban tidak pernah beretemu langsung dengan terdakwa pada saat kejadian terdakwa menelpon korban mngajak bertemu selanjutnya korban mengikuti kemauan terdakwa menunggu di depan lorong

rumah korban dan berselang beberapa saat kemudian datang korban selanjutnya terdakwa, membonceng korban menuju kerumah kos milik terdakwa sesampainya didalam kamar lalu terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan akan tetapi korban menolak dan pada saat itu terdakwa mengancam tidak akan mengantar saksi korban pulang dan dalam keadaan terpaksa akhirnya korban disetubuhi oleh terdakwa dan setelah terdakwa menyetubuhi korban terdakwa meminta lagi. Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 kali korban pada saat kejadian 16 tahun sesuai kutipan akte kelahiran No.VER /23/V/2015/RUMKIT yang dibuat di rumah sakit Bayangkara Makassar bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Reg. Perk: PDM – 36/ Pel / Ep.2 /09/ 2015 adalah sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Ramlan Umar alias Alan pada hari Minggu 10 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Manuruki II Lrg 2 Kota Makassar tempatnya dalam rumah milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban Rosmiati alias Mia(sesuai kutipan Akte Kelahiran No. AL. 853.0042759) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita korban yang diajak oleh terdakwa untuk betemu sehingga saat itu terdakwa menjemput korban didepan rumah korban yaitu di Kompleks Perumahan Mutiara Permai dan saat korban bertemu terdakwa selanjutnya terdakwa membawa korban kerumah kos terdakwa dan saat berada di kamar kos terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata kepada korban “kalo kau sayang sama saya temani saya tidur” akan tetapi korban menolak dan kemudian terdakwa marah dan berkata menyuruh korban untuk pulang saja dan terdakwa tidak akan mengantar korban untuk pulang dan dalam keadaan takut akhirnya korban menuruti permintaan terdakwa yang mana awalnya terdakwa membaringkan korban di atas tempat tidur memegang payu udaranya saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana korban dan celana korban terdakwa selanjutnya korban terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin seksi korban sambil menggoyang-goyangkan selama 10 menit sampai keluar air mani terdakwa yang terdakwa tumpahkan di kasur.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/ 23/ V/ 2015/ RUMKIT yang dibuat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan ditandatangani oleh Dokter Mauluddin. M, Sp. F yang menerangkan bahwa ditemukan luka robek lama pada arah jam 3 dan 9 sampai dasar dan tidak berdarah dan ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma dan malu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Requisitoirnya yang telah dibacakan pada tanggal 2 September 2015 Nomor Req. Perkara : PDM – 36 / Pel /Ep.2 / 09 / 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- a. Menyatakan terdakwa Ramlan Umar als Alan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ramlan als Alan dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa di tahan dan tetap berada di dalam tahanan.
- c. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor.111/Pid.Sus/2015/PN. Mks ini sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa RAMLAN UMAR alias ALAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RAMLAN UMAR alias ALAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungn selama 2 (bulan) :
- c. Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).-

5. Analisis Penulis

Sifat melawan hukun (*wederrechtelijkeheid*) dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan materil (*material wederrechtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formil (*formale wedderrechtelijkeheid*). Sifat melawan hukum materil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkan maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur tindak pidana apabila denga tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana.

Sifat melawan hukum materil terdiri dari sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif dan fungsi melawan hukum dalam fungsi negatif.

Pengertian sifat melawan hukum secara materil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada pasal 1 ayat1 KUHP yang bunyinya:

“suatu perbuatan yang tidakdapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan- ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundan-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat

dipidana, Ajaran sifat melawan hukum materil hanya diterima dalam fungsi yang negatif, dalam artibahwa sebuah perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materil perbutan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Pertama akan ditinjau penerapan hukum pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakimkan memeriksa perkara tersbut untuk dapat diajukan kepengadilan, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang 8/1981 tentang KUHAP, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah telah melalukukan dengan maksud melalukukan tipu muslihat serangkain kebohongan atau pembujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 merupakan undang-undang yang membahas tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dijalankan agar menjamin hak-hak anak sebagai korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 bahwa terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak Pidana Asusila terhadap Anak dibawah umur.

Syarat formil suatu surat dakwaan terdalam dala ketentuan Pasal 143 Ayat 2 huruf a KUHP, sebagai berikut:

(2) Penutut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelaminkebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Jika dicermati surat dakwaan dalam kasus ini sebagai dasar diajukan RAMLAN UMAR Alias ALAN kepengadilan, maka surat dakwaan telah diuraikan tentang hal-hal yang menjadi syarat formal suatu surat dakwaan, seperti sebagai berikut:

Nama Lengkap : Ramlan Umar Alias Alan

Tempat Lahir : Alor

Umur atau Tanggal Lahir : 26 Tahun/ Tahun 1989

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Mannuruki II Lrg. 2 Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Pendidikan : -

Dakwaan tersebut menurut penulis telah memenuhi syarat formal surat dakwaan karena memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, serta telah ditandatangani dan bubuhi tandatangan, secara formil telah memenuhi syarat formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014.

Disamping syarat formil tersebut, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan syarat dalam praktik disebut syarat materil.

Sesuai ketentuan pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP.

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan waktu tindak pidana itu dilakukan.

Secara materil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan

pertama persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative, maka Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan pertama pasal 287 KUHP yang mengatur:

- 1.) Barang siapa yang bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2.) Penuntutan bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang kedua Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kejahatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) yang mengatur :

- 1.) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- 2.) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3.) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidikan, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur - unsur dari pasal 287 KUHP yakni bahwa yang dimaksud dengan "BARANG SIAPA" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh oleh saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangannya terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penunt Umum, maka terdakwa diajukan dalam persidangan ini adalah Ramlam Umar Alias Alan sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “dengan maksud membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” bahwa sipelaku menyadari/ menghendaki suatu dari perempuan (anak) tersebut yaitu ingin menyetubuhinya ingin menghangatkan tubuhnya dengan lawan jenisnya atau kata yang sering digunakan atau didengar adalah melakukan seks atau menghubungkan alat seksnya dengan anak tersebut untuk mendapatkan kepuasan batinianya dan pelaku menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia juga harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan korban tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah menyetubuhi si korban sebanyak 2 (dua) kali.

Unsur “Denganserangkain kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan tubuhnya dengan alat seksnya untuk dinikmatinya, bahwa unsur ini adalah sarana yang diguanakan adalah suatukebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga dia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa memaksa korban tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa telah memaksa korban dengancara mengancam si korban untuk tidak mengantarnya pulang sebelum ditemani tidur, terdakwa minta dua kali terhadap sikorban untuk memasukkan barang tumpulnya pada alat seksnya sikorban karena merasa keenakan setelah dia mnyetubuhinya yang pertama kali dia minta lagi.

Bahwa awalnya terdakwa membaringkan saksi korban di tempat tidur, lalu terdakwa membuka pakaian dan celana dalam seksi korban, kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian korban sampai telanjang bulat dengan rasa tidak sabar

terdakwa untuk menikmati surga yang terpampang didepannya yang tak sehelai benang pun pada tubuh korban lalu terdakwa memegang payu udara sambil meniup menjilati tubuh sikorbang sampai korban tidak berdaya karena mulai terangsang akhirnya terdakwa memeluk saksi korban. setelah selang beberapa menit alat keamin terdakwa berdiri/tegang, lalu terdakwa memasukkan alat keaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil memegang pantat dan mengangkat pantat sedikit sikorban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur samping kiri kanan maju mundur dan tidak berapa lama kemudian sperma korban meluncur keluar dan mencabutnya dan ditumpahkan di atas kasur tempat tidur.

Ad.Unsur “ SETIAP ORANG”

Bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” di sini adalah siapa saja selaku subjek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya pidana yang dilakukannya ;

Bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya “BARANG SIAPA” menurut *Buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi bukun II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi katakata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan

terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukun hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya;

Bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAABAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan. Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa Ramlan Umar Alias Alan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Makassar berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara inidn pembenaran

para saksi yang dihadapkan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar adalah terdakwa Ramlan Umar alias Alan maka jelasnya sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Ramlan Umar alias Alan maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Ramlan Umar alias Alan yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar sehingga Majelis Hakim berpindirian unsur “SETIAP ORANG” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Musihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Peretubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “*dengan sengaja*” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori yaitu:

- *Teori Kehendak (Wills Theorie).*
- *Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).*

Bahwa dalam peraktek peadilan diantara kedua teori tersebut ternyata *Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories)* dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui dan apa yang sebaliknya apa yang diketahuibelum tentu dikehendaki:

Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di Persidangan, dimana antara terdakwa dan saksi korban Rosmiani alias Mia sudah saling kenal dan sering berhubungan melalui handphone dan pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015, pada pukul 00.15 Wita terdakwa menelepon saksi korban melalui Hp mengajak saksi korban keluar rumahnya untuk jalan-jalan. Oleh karena bujukan terdakwa tersebut saksi korban keluar dari rumahnya dan dijemput oleh terdakwa dengan sepeda motor di depan rumahnya di Kompleks Perumahan Mutiara Permai Makassar setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kost terdakwa di Jalan Mannuruki II Lrg 2 kota Makassar setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada di dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa “kalau kamu sayang saya, temani saya tidur” mendengar rayuan dan bujukan terdakwa tersebut saksi korban yang sebelumnya menolak untuk tidur dengan terdakwa, akhirnya terdiam dan menuruti apa yang diperbuat terdakwa kepada dirinya, awalnya terdakwa membaringkan saksi korban di tempat tidur, lalu terdakwa membuka pakaian dan celana dalam saksi korban di tempat tidur, lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa membuka pakaiannya, lalu terdakwa memegang payudara sambil mencium dan memeluk saksi korban, setelah alat kelamin terdakwa berdiri/tegang. Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas kasur tempat tidur, lalu pada pukul 03.00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi korban, dan setelah puas menyetubuhi saksi korban, kemudian terdakwa mengantar kembali saksi korban ke

rumahnya tersebut pada pukul 05.30 Wita. Pada saat kejadian terdakwa menyetubuhi korban baru menginjak 17 Tahun karena saksi korban (terlampir) dengan demikian maka unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Putusan No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN. Mks

1. Pertimbangan Hakim dan Keterangan Saksi

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa yakni:

Menimbang, Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-354/Mks/Ep/06/2015 tertanggal Juni 2015 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Raman Umar Alias Alan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Jalan Mannuruki II Lrg 2 Kota Makassar tempatnya didalam rumah milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Rosmiati Alias Mia (sesuai kutipan akte kelahiran No. AI. 853. 0042759) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut . Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 00. 15 Wita saksi korban yang diajak oleh terdakwa untuk bertemu sehingga saat itu terdakwa menjemput saksi korban yang diajak oleh terdakwa diajak oleh terdakwa bertemu dan menjemput saksi korban di depan rumah saksi korban kerumah kos terdakwa dan saat berada di dalam kamar kos terdakwa. Dengan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata kepada saksi korban “kalo kamu syang sama aku temani saya tidur” akan tetapi saksi korban menolak dan kemudian terdakwa marah dan berkata menyuruh saksi korban untuk pulang saja dan terdakwa tidak akan mengantar saksi korban untuk pulang dan dalam keadaan takut akhirnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa yang mana awalnya terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa memegang payu dara saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana seksi korban dan celana terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin korban sambil menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 menit sampai keluar air mani terdakwa lalu terdakwa tumpahkan di kasur.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER / 23 / V /2015/RUMKI yang dibuat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan ditandatangani oleh Dokter Mauluddin M. sp. F yang menerangkan bahwa ditemukan luka robek lama pada arah jam 3 dan 9 sampai dasar dan tidak bedarah dan ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa / Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

1. ROSMIATI alias MIA

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di jalan Mannuruki II Lrg 2 Kota Makassar tepatnya didalam rumah milik terdakwa
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa lewat handphone dan saksi korban belum bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu selanjutnya saksi korban mengikuti kemauan terdakwa dan saat itu terdakwa menunggu di depan lorong rumah saksi korban dan berselan beberapa saat kemudian datang saksi korban, selanjutnya terdakwa membonceng saksi korban menuju rumah kost milik terdakwa sesampainya didalam kamar lalu terdakwa mengajak untuk berhubungan suami istri atau berhubungan badan akan tetapi saksi korban menolak dan saat itu terdakwa mengancam tidak akan

mengantar saksi korban pulang dan dalam keadaan terpaksa akhirnya saksi korban distubuhi oleh terdakwa.

- Bahwa benar setelah selesai terdakwa menyetubuhi saksi korban saat itu terdakwa meminta lagi
- Bahwa benar terdakwa menyetubi saksi korban selama 2 (dua) kali
- Bahwa benar saksi korban sat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun (sesuai kutipan Akte Kelahiran No. VER / 23/ V/ 2015/ RUMKIT yang dibuat di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan ditanda tangani oleh Dokter Mauluddin.M, Sp.t yang menerangkan bahwa ditemukan luka robek lama pada arahjam 3 dan 9 dasar dan tidak berdarah dan ditemukan tanda-tanda peneterasi benda tumpul yang telah memasuki alat kelamin perempuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menaggapinyabawa keterangan saksi tersebut benar.

2. **Drs. ADI MULIA, M.Pd.**

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau sedikit – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat dijalan Mannuruki II Lrg 2 Kota Makassar tempatnya didalam rumah milik terdakwa.

- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak berada di rumah dan saksi mengetahui bahwa saksi korban keluar dan tidak pulang kerumah dari saksi Yustina Ainun alias Tina yang mengatakan bahwa saksi korban dan keluar dan belum pulang-puang.
- Bahwa benar saat itu saksi pergi mencari saksi korban dan saat saksi korban pulang kerumah, saksi menanyakan tentang apa yang terjadi dan saksi korban bercerita bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa benar saat itu saksi langsung melapor ke kantor polisi dan mencari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar.

3. **YUSTINAAINUN alias TINA**

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada saat waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Mannuruki II Lrg. 2 Kota Makassar tempatnya didalam milik rumah terdakwa
- Bahwa benar saat kejadian saksi sudah tertidur dan tidak mendengar saksi korban keluar dari rumah
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban keluar pada keesokan harinya

- Bahwa benar saat itu saksi korban belum pulang juga kerumah sehingga saksi memberitahukan kepada saksi Andi Mulia bahwa saksi korban tidak pulang
- Bahwa benar saksi korban pulang kerumah saksi korban bercerita bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobjektif mungkin maka, di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa RAMLAN alias ALAN yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Mannuruki II Lrg Kota Makassar tepatnya didalam rumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa pada saat membawa saksi korban terdakwa sampai menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa saat ini menghubungi saksi korban dan mengajak bertemu
- Bahwa benar sampai didalam kamar kost milik terdakwa, terdakwa langsung meminta kepada saksi korban untuk bersetubuh

- Bahwa benar awalnya saksi korban menolak akan tetapi terdakwa mengancam tidak akan mengantar saksi korban untuk pulang
- Bahwa benar terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa sayang sama saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan selain keterangan saksi –saksi , Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat Berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor: 23/V/2015/Forensik, tertanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan keahlian dan sumpah jabatan oleh Dokter dr. MAULIDDIN M, Sp. F yang telah memeriksa seseorang perempuan bernama: MIA, lahir di Bima, tanggal 23 September 1998, umur 17 tahun.

Menimbang, bahwa dalam rangka Hakim menentukan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti surat dan barang bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 184 KUHP tentang tentang batas minimum pembuktian untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Korban Rosmiati alias MIA sudah saling kenal dan sering berhubungan melalui handphone;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015, pada pukul 00.15 Wita terdakwa menelpon saksi korban melalui Hp mengajak saksi korban keluar rumah untuk jalan-jalan;
- Bahwa oleh karena bujukan terdakwa tersebut saksi korban keluar dari rumah dan dijemput oleh terdakwa dengan sepeda motor didepan rumahnya di Kompleks Perumahan Mutiara Permai Makassar;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban sudah berada di dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa merayu saksi korban ke rumah kost terdakwa di Jalan Mannuruki II Lrg.2 Kota Makassar;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada di dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa “kalau kamu sayang saya” temani saya tidur;
- Bahwa mendengar rayuan dan bujukan terdakwa tersebut, saksi korban yang sebelumnya menolak untuk tidur dengan terdakwa, akhirnya terdiam dan menuruti apa yang diperbuat oleh terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa awalnya terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur, lalu terdakwa membuka pakaian dan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celana dan seluruh pakaian korban lalu terdakwa memegang payu dara sambil mencium dan memeluk saksi korban setelah alat kelamin terdakwa berdiri/tegang, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-

goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian spermanya keluar dan ditumpahkan kasur tempat tidur.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban baring-bering di tempat tidur sabil mengobrol, lalu pada pukul 03.00 terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa mengantar kembali saksi korban kerumahnya tersebut pada pukul 05.30 Wita ;

- Bahwa pada saa kejadian terdakwa menyetubuhi saksi korban usia saksi korban baru menginjak 17 Tahun, kerana saksi korban lahir pada tanggal 23 September 1998 sesuai kutipan Akta Kelahiran saksi korban (terlampir);

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsure-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang unsur –unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG”

Menimbang bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” di sini adalah siapa saja selaku subjek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya “BARANG SIAPA” menurut *Buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi bukun II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi katakata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAABAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan. Surat Perintah Penahanan dari kejaksaan terhadap terdakwa Ramlan Umar Alias Alan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Makassar berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara inidan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar adalah terdakwa Ramlan Umar alias Alan maka jelasnya sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Ramlan Umar alias Alan maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Ramlan Umar alias Alan yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar sehingga Majelis Hakim berpindirian unsur “SETIAP ORANG” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Musihat, Serangkaian
Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Peretubuhan Dengannya Atau
Dengan Orang Lain”**

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “*dengan sengaja*” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori yaitu:

- *Teori Kehendak (Wills Theorie).*
- *Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).*

Menimbang bahwa dalam peraktek peadilan diantara kedua teori tersebut ternyata *Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories)* dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui dan apa yang sebaliknya apa yang diketahuibelum tentu dikehendaki:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di Persidangan, dimana antara terdakwa dan saksi korban Rosmiani alias Mia sudah saling kenaldan sering berhubungan melalui handphone dan pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015, pada pukul 00.15. Wita tedakwa menelpone saksi korban melalui Hp mengajak saksi korban keluar rumahnya untuk jalan-jalan. Oleh karena bujukan terdakwa tersebut saksi korban keluar dari rumahnya dan dijemput oleh terdakwa dengan sepeda motor didepan rumahnya di Kompleks Perumahan Mutiara Permai

Makassar setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kost terdakwa di Jalan Mannuruki II Lrg 2 kota Makassar setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada di dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa “kalau kamu sayang saya, temani saya tidur” mendengar rayuan dan bujukan terdakwa tersebut saksi korban yang sebelumnya menolak untuk tidur dengan terdakwa, akhirnya terdakwa dan menuruti apa yang diperbuat terdakwa kepada dirinya, awalnya terdakwa membaringkan saksi korban di tempat tidur, lalu terdakwa membuka pakaian dan celana dalam saksi korban di tempat tidur, lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa membuka pakaiannya, lalu terdakwa memegang payu dara sambil mencium dan memeluk saksi korban, setelah alat kelamin terdakwa berdiri/tegang. Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas kasur tempat tidur, lalu pada pukul 03.00 Wita. Terdakwa kembali menyetubuhi korban, dan setelah puas menyetubuhi saksi korban, kemudian terdakwa mengantarkan kembali saksi korban ke rumahnya tersebut pada pukul 05.30 Wita. Pada saat kejadian terdakwa menyetubuhi korban baru menginjak 17 Tahun karena saksi korban (terlampir) dengan demikian maka unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasanpun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa oleh karena itu sudah seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan Nota Pembelian dari Penasehat Hukum terdakwa, Tuntutan pidana dan Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Rosmiati alias Mia.

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Sepanjang penglihatan Majelis Hakim terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan telah mengakui akan kesalahan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa olehkarena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

2. Analisis Penulis

Setelah melihat amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (PU), keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang dimuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak SUPRAYOGI, SH yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas asas tuntutan penuntut umum dan fakta yang terungkap di persidangan, kemudian hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat pasal

81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang menjadi dasar untuk penghapusan pidana atas terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk penghapusan pidana atas terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, adapun hal-hal yang meringankan selama terdakwa pada perkara ini:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disertai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana Penuntut Umum serta ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, majelis hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

D. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

Dalam Putusan No. 111 / Pid. Sus / 2015 / PN. Mks

Anak hendaknya diberikan perlindungan dari media massa. Kenyataan sering ssekali dijumpai media massa memberikan berita anak sebagai korban asusila. Adapun permasalahanya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban asusila dalam peberitaan media massa, sebagai upaya pencegahan anak terhadap anak korban kejahatan dari pemberitaan pada media massa. Di dalam pasal 59 Undang-Undang perlindungan anak, disebutkan bahwa perlindungan khususnya wajib diberikan kepada anak yang berhadap dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan salah satunya adalah kejahatan asusila seperti yang saya teliti saat ini di Pengadilan Negeri Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum dan Perundang-Undangannya terhadap tindak pidana asusila pada anak dibawah umur dalam Perkara Putusan No. 111/ Pid. Sus/2015/PN.Mks, terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternative yaitu pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana asusila pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014.
2. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan Yuridis (hukum), fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal yang mendukung serta saksi pidana yang dijatuhkan sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi

terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagai fungsi pidana pada mestinya.

3. Bentuk perlindungan hukum kejahatan kesusilaan anak dalam Putusan No. 111/Pid. Sus/2015/PN. Mks, Anak hendaknya diberikan perlindungan dari media massa. Kenyataan sering sekali dijumpai media massa memberikan berita anak sebagai korban asusila.

B. Implikasi Penelitian

1. Penerapan saksi pidana harus dilakukan secara optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana khusus tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.
2. Selain memberikan saksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur maka diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutuskan perkara memperhatikan pula segi nonyuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatakan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan agar sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi dengan saksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangnya.

KEPUSTAKAAN

Abir, Al-Jazairi. *Minhajul Muslim*, Darul Fikr.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Toha Putra, 2002).

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta; Kencana 2010.

Wkusuma, Muljyana.. *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Cet. I; Jakarta; CV. Rajawali, 1986).

Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,*Antara Norma dan Realita* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Laden, Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Cet Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Moeljetno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, (cet ke -6 . Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*,(cet ke-5. Bogor:Politeia , 1996.

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*, (), cet. Ke-2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Suyatno, Bagug. *Masalah Sosial Anak*, (cet ke-2. Jakarta : Kencana, 2010).

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

Soetodjo, Wagiat. *Deklarasi Hak Anak-Anak, Hukum Pidana Anak*, Bandung, 2008.

Gosita, Arif dan Syamsuddin Muchtar. *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana* (Disertasi). Makassar. 2012.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hakim, Garuda Nusantara, Abdul *Prospek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan hak-hak Anak*, Jakarta, 1986.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PRATIWI AURINA, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 19 April 1993 dari pasangan Herman Sumantri dan Nurlia Sanusi. Merupakan anak kedua dari Empat bersaudara. Penulis pertama kali melangkahhkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 1999 di SDN Angkasa I tahun 1999-2005. Kemudian penulisan melanjutkan ke tingkat Madrasah Tsanawiyah Negeri Biringkanaya Makassar tahun 2005-2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA Negeri 15 Makassar tahun 2008-2011. Kemudian setelah tamat penulis memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu, selanjutnya penulis memilih jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum terhitung pada tahun 2012-2016.

KUISONER WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, apakah sudah sesuai dengan pelaksanaannya khususnya dikota makassar ini?
2. Apakah dalam putusan ini , hakim sudah tepat menjatuhkan vonis terhadap pelaku kejahatan kesusilaan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban apabila ia tidak mengetahui sama sekali mengenai i perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang perlindungan anak?
4. Apa saja faktor-faktor penyebab anak menjadi korban kejahatan kesusilaan ditahun 2015?